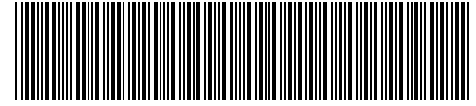




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408870/2022**



DS:6028-5296-9292-2224

Revisi ke 16

Tanggal : 16 Januari 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (22) BALI
 4. Kode/Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
- Sebesar : Rp. 17.417.927.000 (TUJUH BELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen
013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Uang

Rp. 17.417.927.000
Rp. 17.417.927.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 17.417.927.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 17.417.927.000

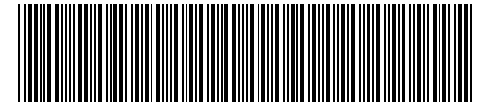
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			17.417.927.000	
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			17.417.927.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan 16.101.990.000	
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan 99.310.000	
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan 139.333.000
			03	EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan 319.450.000
			04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan 12.500.000
			05	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan 15.531.397.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,00	Unit 435.177.000	
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	30,00	Unit 435.177.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	163,00	Orang 135.340.000	
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	163,00	Orang 135.340.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen 745.420.000	
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen 269.188.000	
			02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen 196.572.000
			03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen 216.260.000
			04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen 63.400.000

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

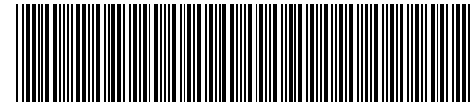
ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022

I B. SUMBER DANA



DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	17.417.927.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	17.417.927.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



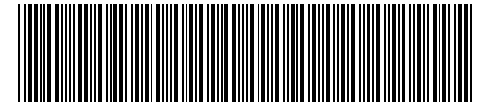
DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	11.650.383	5.332.367	435.177	-	-	17.417.927		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.650.383	5.332.367	435.177	-	-	17.417.927		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	11.650.383	5.332.367	435.177	-	-	17.417.927		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	11.650.383	4.451.607	-	-	-	16.101.990	22 . 51	
01	RM	11.650.383	4.451.607	-	-	-	16.101.990	037	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	-	435.177	-	-	435.177	22 . 51	
01	RM	-	-	435.177	-	-	435.177	037	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	135.340	-	-	-	135.340	22 . 51	
01	RM	-	135.340	-	-	-	135.340	037	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	745.420	-	-	-	745.420	22 . 51	
01 RM		-	745.420	-	-	-	745.420	037	
JUMLAH		11.650.383	5.332.367	435.177	-	-	17.417.927		

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

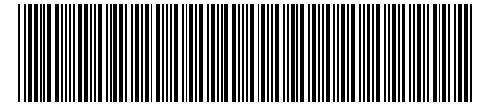
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	967.389	1.929.451	1.091.422	1.900.844	1.254.329	1.407.400	2.028.231	1.168.579	1.098.449	1.203.235	1.157.139	2.211.459	17.417.927
		BELANJA PEGAWAI	711.908	834.116	857.696	1.546.640	857.036	803.159	1.544.734	826.012	860.425	855.247	845.161	1.108.250	11.650.383
		BELANJA BARANG	255.481	1.095.335	233.726	354.204	397.293	604.241	483.497	203.817	238.024	347.988	311.978	806.782	5.332.367
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	138.750	0	0	0	296.427	435.177
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	967.389	1.929.451	1.091.422	1.900.844	1.254.329	1.407.400	2.028.231	1.168.579	1.098.449	1.203.235	1.157.139	2.211.459	17.417.927
		51 BELANJA PEGAWAI	711.908	834.116	857.696	1.546.640	857.036	803.159	1.544.734	826.012	860.425	855.247	845.161	1.108.250	11.650.383
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	255.481	1.095.335	233.726	354.204	397.293	604.241	483.497	203.817	238.024	347.988	311.978	806.782	5.332.367
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	138.750	0	0	0	296.427	435.177

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
IV A. B L O K I R**



DS:6028-5296-9292-2224

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408870] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408870/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:6028-5296-9292-2224

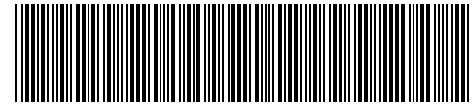
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408870] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408873/2022**

Revisi ke 06

Tanggal : 16 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | Ditjen Administrasi Hukum Umum |
| 3. Provinsi | : (22) | BALI |
| 4. Kode/Nama Satker | : (408873) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR |
| Sebesar | : Rp. 4.457.837.000 | (EMPAT MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	4.457.837.000
Rp.	4.457.837.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 4.457.837.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 4.457.837.000 |
|------------------|-----------|---------------|

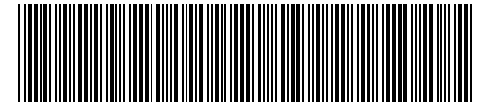
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.457.837.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4.457.837.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNBPN Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.AEA	Koordinasi	9,00	kegiatan	543.843.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	9,00	Kegiatan	543.843.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	2.122.611.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	Layanan	2.122.611.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	92.130.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	92.130.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10,00	Lembaga	1.699.253.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	10,00	Lembaga	1.699.253.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022

I B. SUMBER DANA



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	4.457.837.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	4.457.837.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



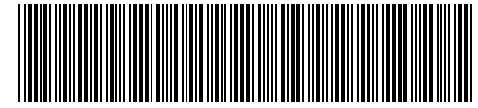
DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408873	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	4.457.837	-	-	-	4.457.837		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.457.837	-	-	-	4.457.837		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	4.457.837	-	-	-	4.457.837		
5251.AEA	Koordinasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	543.843	-	-	-	543.843	22 . 51	
04	PNBP	-	543.843	-	-	-	543.843	037	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	2.122.611	-	-	-	2.122.611	22 . 51	
04	PNBP	-	2.122.611	-	-	-	2.122.611	037	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	92.130	-	-	-	92.130	22 . 51	
04	PNBP	-	92.130	-	-	-	92.130	037	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	1.699.253	-	-	-	1.699.253	22 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	1.699.253	-	-	-	1.699.253	037	
JUMLAH		-	4.457.837	-	-	-	4.457.837		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

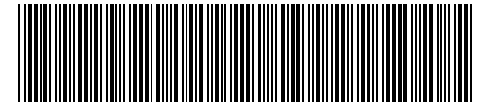
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408873	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	198.928	248.157	843.895	689.135	306.455	275.335	327.301	337.652	240.554	175.971	296.623	517.830	4.457.837
		BELANJA BARANG	198.928	248.157	843.895	689.135	306.455	275.335	327.301	337.652	240.554	175.971	296.623	517.830	4.457.837
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	198.928	248.157	843.895	689.135	306.455	275.335	327.301	337.652	240.554	175.971	296.623	517.830	4.457.837
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	198.928	248.157	843.895	689.135	306.455	275.335	327.301	337.652	240.554	175.971	296.623	517.830	4.457.837

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
IV A. B L O K I R**



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408873] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

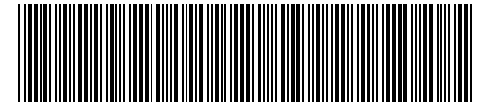
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408873/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:1087-5227-5417-7733

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408873] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

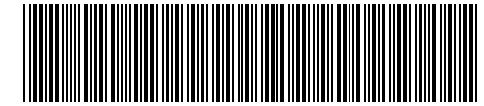
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408880/2022**



DS:3454-8881-7210-2282

Revisi ke 08

Tanggal : 06 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (22) BALI
 4. Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
- Sebesar : Rp. 144.008.000 (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen
013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 144.008.000
Rp. 144.008.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 144.008.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 144.008.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			144.008.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			144.008.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
		2. 02	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	144.008.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Pengkajian Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	136.684.000
		02 ABD.002	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	7.324.000

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

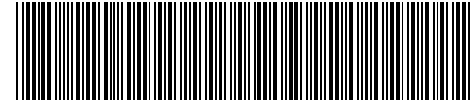
ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022

I B. SUMBER DANA



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	144.008.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	144.008.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408880	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	144.008	-	-	-	144.008		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	144.008	-	-	-	144.008		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	144.008	-	-	-	144.008		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	144.008	-	-	-	144.008	22 . 51	
01	RM	-	144.008	-	-	-	144.008	037	
JUMLAH		-	144.008	-	-	-	144.008		

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

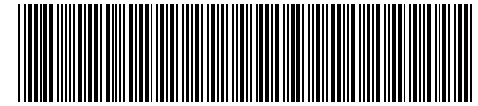
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408880	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	15.180	43.334	10.350	10.330	17.000	22.140	10.000	15.624	0	0	49	144.008
		BELANJA BARANG	0	15.180	43.334	10.350	10.330	17.000	22.140	10.000	15.624	0	0	49	144.008
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	15.180	43.334	10.350	10.330	17.000	22.140	10.000	15.624	0	0	49	144.008
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	15.180	43.334	10.350	10.330	17.000	22.140	10.000	15.624	0	0	49	144.008

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022
IV A. B L O K I R**



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408880] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

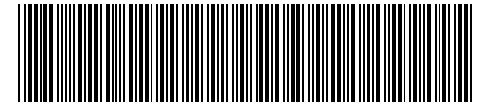
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408880/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:3454-8881-7210-2282

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408880] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

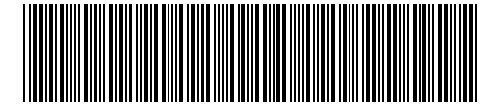
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196406191988111001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408879/2022**



DS:5442-6939-6329-7040

Revisi ke 13

Tanggal : 01 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi	: (10)	Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi	: (22)	BALI
4. Kode>Nama Satker	: (408879)	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Sebesar	: Rp. 766.454.000	(TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	766.454.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN DENPASAR (037) Rp. 766.454.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022

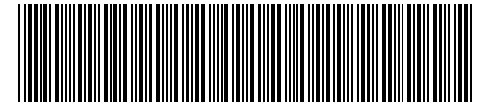


DS:5442-6939-6329-7040

Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	127.968.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	127.968.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	638.486.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	638.486.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



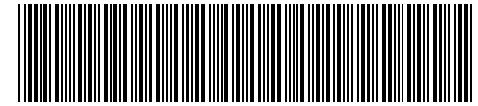
DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			127.968.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			127.968.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	76.361.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	76.361.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	51.607.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	51.607.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			638.486.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			638.486.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	106.420.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	79.658.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	26.762.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga	67.459.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	6,00	Lembaga	67.459.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	93.317.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	60.050.000
Rincian Output		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	Layanan	33.267.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		57,00	Orang	298.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	57,00	Orang/Kasus	298.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat	73.290.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	6,00	Kegiatan	73.290.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022

I B. SUMBER DANA



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

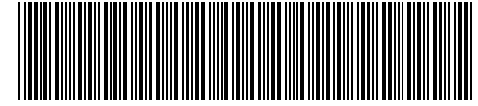
Halaman : I B. 1

		Rp.	766.454.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2022					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	766.454.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	746.454	20.000	-	-	766.454		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	127.968	-	-	-	127.968		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	127.968	-	-	-	127.968		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	76.361	-	-	-	76.361	22 . 51	
01	RM	-	76.361	-	-	-	76.361	037	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	51.607	-	-	-	51.607	22 . 51	
01	RM	-	51.607	-	-	-	51.607	037	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	618.486	20.000	-	-	638.486		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	618.486	20.000	-	-	638.486		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	106.420	-	-	-	106.420	22 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

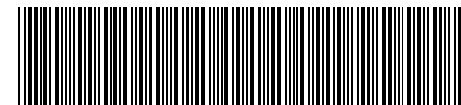
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	106.420	-	-	-	106.420	037	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	67.459	-	-	-	67.459	22 . 51	
01 RM		-	67.459	-	-	-	67.459	037	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	73.317	20.000	-	-	93.317	22 . 51	
01 RM		-	73.317	20.000	-	-	93.317	037	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	298.000	-	-	-	298.000	22 . 51	
01 RM		-	298.000	-	-	-	298.000	037	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	73.290	-	-	-	73.290	22 . 51	
01 RM		-	73.290	-	-	-	73.290	037	
JUMLAH		-	746.454	20.000	-	-	766.454		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

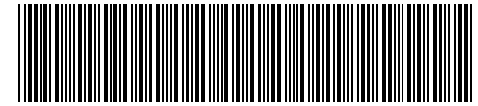
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	16.890	129.034	48.793	8.206	105.246	44.586	25.493	90.421	131.068	50.529	116.187	766.454
		BELANJA BARANG	0	16.890	129.034	48.793	8.206	85.246	44.586	25.493	90.421	131.068	50.529	116.187	746.454
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	0	16.184	5.154	0	1.761	39.111	0	8.200	27.635	17.350	12.574	127.968
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	16.184	5.154	0	1.761	39.111	0	8.200	27.635	17.350	12.574	127.968
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	16.890	112.851	43.639	8.206	103.486	5.475	25.493	82.221	103.433	33.179	103.614	638.486
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	16.890	112.851	43.639	8.206	83.486	5.475	25.493	82.221	103.433	33.179	103.614	618.486
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
IV A. B L O K I R**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408879] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

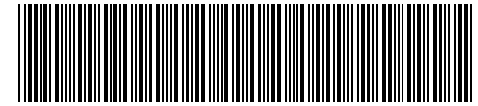
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408879/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:5442-6939-6329-7040

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408879] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR		
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
4841.BMA	Data dan Informasi Publik		
		Rp.	5.522
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
	* null NARASUMBER UNI PUSAT	Rp.	5.522

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408875/2022**



DS:4095-0174-9950-3000

Revisi ke 07

Tanggal : 19 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | Ditjen Imigrasi |
| 3. Provinsi | : (22) | BALI |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408875) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR |
| Sebesar | : Rp. | 1.287.503.000 (SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- | | | | |
|----------------|--|-----|---------------|
| 013.06.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. | 1.287.503.000 |
| 013.06.BF.5254 | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp. | 1.287.503.000 |

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.287.503.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 1.287.503.000 |
|------------------|-----------|---------------|

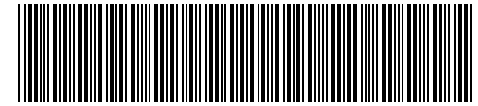
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.287.503.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.287.503.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			
		2. 02	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.AEA	Koordinasi	24,00	kegiatan	679.168.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	24,00	Kegiatan	679.168.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	14,00	operasi	505.775.000
Rincian Output	:	01 BHB.U01	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	8,00	Operasi	299.104.000
		02 BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	4,00	Operasi	134.000.000
		03 BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	1,00	Operasi	50.870.000
		04 BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	Operasi	21.801.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2,00	laporan	102.560.000
Rincian Output	:	01 BKA.001	Pengawasan Orang Asing	2,00	Laporan	102.560.000

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022

I B. SUMBER DANA



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.287.503.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.287.503.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	1.287.503	-	-	-	1.287.503		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.287.503	-	-	-	1.287.503		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.287.503	-	-	-	1.287.503		
5254.AEA	Koordinasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	679.168	-	-	-	679.168	22 . 51	
04	PNBP	-	679.168	-	-	-	679.168	037	
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	505.775	-	-	-	505.775	22 . 51	
04	PNBP	-	505.775	-	-	-	505.775	037	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	102.560	-	-	-	102.560	22 . 51	
04	PNBP	-	102.560	-	-	-	102.560	037	
JUMLAH		-	1.287.503	-	-	-	1.287.503		

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

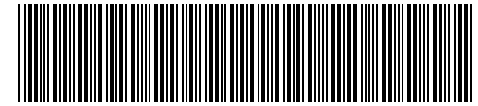
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408875	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	34.200	80.977	161.327	71.868	137.898	147.444	127.546	76.409	89.003	152.702	208.129	1.287.503
		BELANJA BARANG	0	34.200	80.977	161.327	71.868	137.898	147.444	127.546	76.409	89.003	152.702	208.129	1.287.503
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	34.200	80.977	161.327	71.868	137.898	147.444	127.546	76.409	89.003	152.702	208.129	1.287.503
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	34.200	80.977	161.327	71.868	137.898	147.444	127.546	76.409	89.003	152.702	208.129	1.287.503

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022
IV A. B L O K I R**



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408875] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

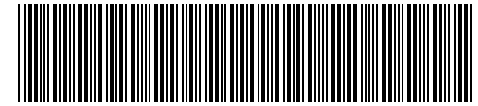
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttt.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408875/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:4095-0174-9950-3000

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408875] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408874/2022**



DS:0872-3740-0098-0641

Revisi ke 13

Tanggal : 16 Januari 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (22) BALI
4. Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
- Sebesar : Rp. 904.102.000 (SEMBILAN RATUS EMPAT JUTA SERATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	904.102.000
Rp.	904.102.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	904.102.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 904.102.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



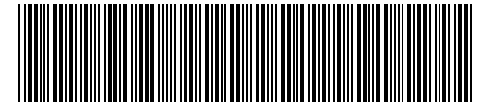
DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	904.102.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	904.102.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	535.860.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	535.860.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60,00	orang	186.712.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	60.00	orang	186.712.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi	181.530.000
Rincian Output	:	01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	181.530.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

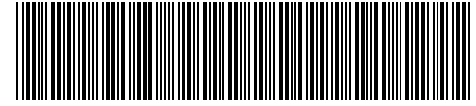
ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022

I B. SUMBER DANA



DS:0872-3740-0098-0641

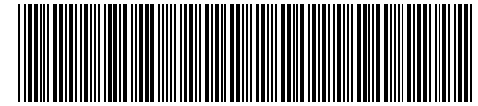
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

		Rp.	904.102.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2022					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	904.102.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408874	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	904.102	-	-	-	904.102		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	904.102	-	-	-	904.102		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	904.102	-	-	-	904.102		
5252.AEA	Koordinasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	535.860	-	-	-	535.860	22 . 51	
01	RM	-	535.860	-	-	-	535.860	037	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	186.712	-	-	-	186.712	22 . 51	
01	RM	-	186.712	-	-	-	186.712	037	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	181.530	-	-	-	181.530	22 . 51	
01	RM	-	181.530	-	-	-	181.530	037	
JUMLAH		-	904.102	-	-	-	904.102		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

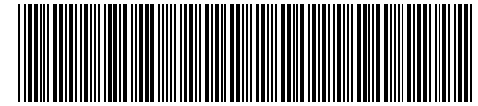
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408874	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	18.240	56.310	114.104	68.716	79.775	98.259	55.329	14.070	147.750	72.030	179.519	904.102
		BELANJA BARANG	0	18.240	56.310	114.104	68.716	79.775	98.259	55.329	14.070	147.750	72.030	179.519	904.102
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	18.240	56.310	114.104	68.716	79.775	98.259	55.329	14.070	147.750	72.030	179.519	904.102
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	18.240	56.310	114.104	68.716	79.775	98.259	55.329	14.070	147.750	72.030	179.519	904.102

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408874] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

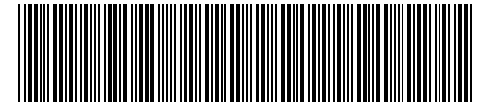
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0872-3740-0098-0641

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408874] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

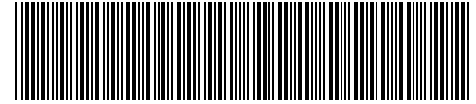
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408878/2022**



DS:1720-2485-7060-0567

Revisi ke 06

Tanggal : 07 Oktober 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (22) BALI
 4. Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
- Sebesar : Rp. 223.085.000 (DUA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 223.085.000
Rp. 223.085.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 223.085.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 223.085.000

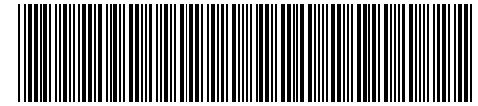
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			223.085.000
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			223.085.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
		2. 01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
		3. 02	jumlah kab/kota peduli HAM			
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5255.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	15.135.000
Rincian Output	:	01	ABD.003 Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	15.135.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5255.AEA Koordinasi	2,00	kegiatan	88.345.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi antar Pemerintah Daerah	2,00	Kegiatan	88.345.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5255.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,00	Lembaga	116.955.000
Rincian Output	:	01	BDB.001 Fasilitasi Proses Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	1,00	Lembaga	40.790.000
		02	BDB.002 Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	1,00	Lembaga	40.945.000
		03	BDB.003 Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	1,00	Rekomendasi	35.220.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5255.BMA Data dan Informasi Publik	1,00	layanan	2.650.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Layanan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi HAM	1,00	Layanan	2.650.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022

I B. SUMBER DANA



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	223.085.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	223.085.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



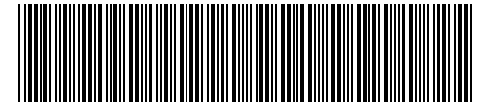
DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408878	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	223.085	-	-	-	223.085		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	223.085	-	-	-	223.085		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	223.085	-	-	-	223.085		
5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	15.135	-	-	-	15.135	22 . 51	
01	RM	-	15.135	-	-	-	15.135	037	
5255.AEA	Koordinasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	88.345	-	-	-	88.345	22 . 51	
01	RM	-	88.345	-	-	-	88.345	037	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	116.955	-	-	-	116.955	22 . 51	
01	RM	-	116.955	-	-	-	116.955	037	
5255.BMA	Data dan Informasi Publik (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	2.650	-	-	-	2.650	22 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	2.650	-	-	-	2.650	037	
JUMLAH		-	223.085	-	-	-	223.085		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

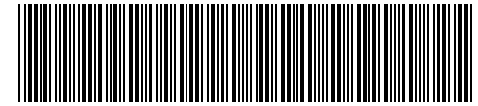
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408878	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	19.855	43.184	35.155	32.280	11.150	27.430	12.450	19.601	21.981	0	0	223.085
		BELANJA BARANG	0	19.855	43.184	35.155	32.280	11.150	27.430	12.450	19.601	21.981	0	0	223.085
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	19.855	43.184	35.155	32.280	11.150	27.430	12.450	19.601	21.981	0	0	223.085
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	19.855	43.184	35.155	32.280	11.150	27.430	12.450	19.601	21.981	0	0	223.085

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
IV A. B L O K I R**



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408878] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

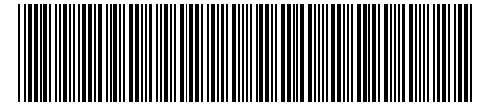
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408878/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:1720-2485-7060-0567

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408878] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

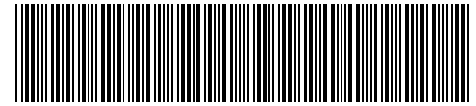
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408876/2022**



DS:0801-9796-7706-6905

Revisi ke 07

Tanggal : 16 Januari 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
3. Provinsi : (22) BALI
4. Kode/Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
- Sebesar : Rp. 1.166.476.000 (SATU MILIAR SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.166.476.000
Rp. 1.166.476.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.166.476.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN DENPASAR (037) Rp. 1.166.476.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.166.476.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.166.476.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah			
		2. 01	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual			
		3. 02	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah			
		4. 02	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah			
		5. 03	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5253.BAH Pelayanan Publik Lainnya	55,00	layanan	331.866.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	55,00	Permohonan	331.866.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5253.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	549,00	Orang	628.258.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	451,00	Orang	518.973.000
		02	BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	98,00	Orang	109.285.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5253.BKB Pemantauan produk	1,00	laporan	206.352.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	1,00	Laporan	206.352.000

Jakarta, 17 November 2021
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

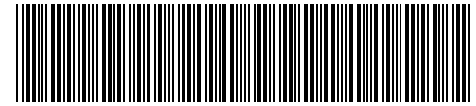
ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022

I B. SUMBER DANA



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

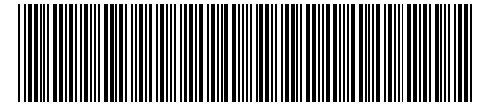
		Rp.	1.166.476.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2022					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			1.166.476.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

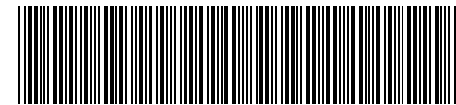
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408876	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	1.166.476	-	-	-	1.166.476		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.166.476	-	-	-	1.166.476		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.166.476	-	-	-	1.166.476		
5253.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	331.866	-	-	-	331.866	22 . 51	
04	PNBP	-	331.866	-	-	-	331.866	037	
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	628.258	-	-	-	628.258	22 . 51	
04	PNBP	-	628.258	-	-	-	628.258	037	
5253.BKB	Pemantauan produk (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	206.352	-	-	-	206.352	22 . 51	
04	PNBP	-	206.352	-	-	-	206.352	037	
JUMLAH		-	1.166.476	-	-	-	1.166.476		

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

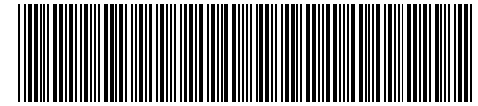
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408876	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	57.780	76.481	305.462	175.618	129.585	103.240	106.263	53.090	45.589	64.390	48.977	0	1.166.476
		BELANJA BARANG	57.780	76.481	305.462	175.618	129.585	103.240	106.263	53.090	45.589	64.390	48.977	0	1.166.476
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	57.780	76.481	305.462	175.618	129.585	103.240	106.263	53.090	45.589	64.390	48.977	0	1.166.476
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	57.780	76.481	305.462	175.618	129.585	103.240	106.263	53.090	45.589	64.390	48.977	0	1.166.476

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408876] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

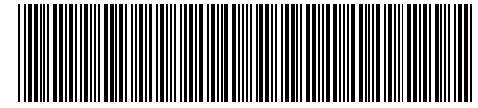
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408876/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0801-9796-7706-6905

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408876] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

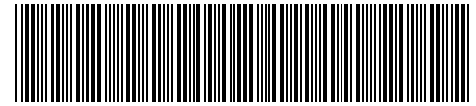
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408877/2022**



DS:0430-0092-3656-5790

Revisi ke 08

Tanggal : 05 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |
| 3. Provinsi | : (22) | BALI |
| 4. Kode/Nama Satker | : (408877) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR |
| Sebesar | : Rp. | 250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	250.000.000
013.08.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	250.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	250.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN DENPASAR | (037) Rp. | 250.000.000 |
|------------------|-----------|-------------|

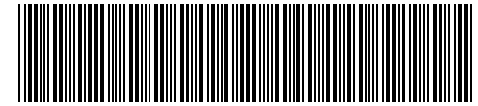
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			250.000.000
Kegiatan	: 5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			250.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
	: 2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34,00	Rekomendasi Kebijakan	193.997.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	34,00	Rekomendasi Kebijakan	193.997.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20,00	Orang	56.003.000
Rincian Output	: 01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20,00	Orang	56.003.000

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022

I B. SUMBER DANA



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	250.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	250.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
Kewenangan : (KD)

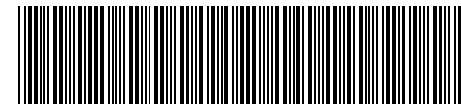
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408877	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	-	250.000	-	-	-	250.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	250.000	-	-	-	250.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	250.000	-	-	-	250.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	193.997	-	-	-	193.997	22 . 51	
01	RM	-	193.997	-	-	-	193.997	037	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	56.003	-	-	-	56.003	22 . 51	
01	RM	-	56.003	-	-	-	56.003	037	
JUMLAH		-	250.000	-	-	-	250.000		

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

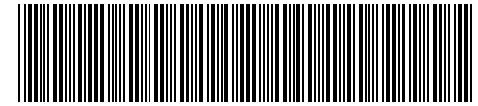
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408877	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	25.665	39.458	16.929	17.753	18.173	17.811	44.677	13.204	7.196	500	48.634	250.000
		BELANJA BARANG	0	25.665	39.458	16.929	17.753	18.173	17.811	44.677	13.204	7.196	500	48.634	250.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	25.665	39.458	16.929	17.753	18.173	17.811	44.677	13.204	7.196	500	48.634	250.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	25.665	39.458	16.929	17.753	18.173	17.811	44.677	13.204	7.196	500	48.634	250.000

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408877] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

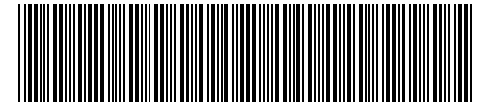
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0430-0092-3656-5790

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408877] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001